



Contents lists available at Journal IICET

JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpci>



Competence and public service orientation as determinants of legislative performance: a study of members of the Kerinci regency regional house of representatives

Novandri Panca Putra^{*}, Suhelmi Helia

Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi ilmu ekonomi KBP Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 15th, 2026

Revised Jun 10th, 2026

Accepted Jun 24th, 2026

Keywords:

Competence
Public service orientation
Legislator performance

ABSTRACT

Legislator performance is a critical determinant of the effectiveness of regional development oversight, yet it remains underexplored empirically at the regency-level legislature. This study examines the effect of competence and public service orientation on legislator performance among members of the Kerinci Regency Regional House of Representatives (DPRD), both partially and simultaneously. A quantitative associative approach was employed with a population of 30 DPRD members selected through total sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results show that competence has a positive and significant effect on legislator performance ($t = 3.122$; $\text{sig} = 0.004$), as does public service orientation ($t = 9.649$; $\text{sig} = 0.000$). Simultaneously, both variables significantly affect performance ($F = 49.613$; $\text{sig} = 0.000$), contributing 78.6%. These findings confirm the need to strengthen legislators' technical capacity and public-interest orientation simultaneously to optimize legislative oversight at the regional level.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Novandri Panca Putra,
Sekolah Tinggi ilmu ekonomi KBP Padang
Email: putrafighter33@gmail.com

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada posisi strategis sebagai representasi rakyat yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki peran fundamental karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut pada akhirnya sangat ditentukan oleh kinerja individu legislator dalam menjalankan mandat politik sekaligus amanah publiknya.

Secara teoretis, fungsi pengawasan legislatif merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan demokratis. Prinsip tata kelola yang baik menempatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan daerah (United Nations Development Programme, 2020). Mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta memastikan pengawasan yang efektif antarlembaga negara (Lijphart, 2021). Dalam kerangka ini, DPRD berperan sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif daerah, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, sehingga efektivitas fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas dan kinerja individu legislator dalam menjalankan perannya secara kritis dan konstruktif.

Pada konteks nasional, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah masih memperlihatkan tantangan yang cukup besar. Berbagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan masih adanya persoalan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, hingga pelaksanaan program yang belum tepat sasaran. Persoalan tersebut kerap berkaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif daerah, yang di banyak daerah masih cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum sepenuhnya menyentuh pengawasan substantif yang kritis dan konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran DPRD sebagai institusi pengawas pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas para legislatornya, sejalan dengan pandangan bahwa kinerja sektor publik perlu dilihat tidak hanya dari aktivitas administratif, tetapi juga dari kualitas proses, keluaran, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat (Van Dooren et al., 2020; Leston-Bandeira & Thompson, 2020).

Berbagai kajian dalam periode 2018–2024 menunjukkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam lembaga legislatif daerah berkaitan dengan kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsinya serta sejauh mana legislator memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa berbagai problem legislasi dan pengawasan daerah kerap muncul karena kompetensi anggota legislatif yang tidak merata, di mana tidak semua memiliki kemampuan teknis membaca dokumen pembangunan, menganalisis kebijakan publik, serta memahami indikator kinerja pembangunan (Labay et al., 2021; Fikri et al., 2024). Di sisi lain, sebagian legislator di berbagai daerah dinilai belum sepenuhnya menjadikan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam aktivitas politik dan tugas kelembagaannya (Maabuat, 2019; Wijaya & Prasetyo, 2022). Kondisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa kompetensi dan orientasi pelayanan publik memiliki keterkaitan erat dengan kinerja legislator.

Kompetensi dipahami sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan individu melaksanakan tugasnya secara efektif (Campion et al., 2020). Dalam konteks DPRD, kompetensi legislator mencakup kemampuan memahami dokumen perencanaan pembangunan, menganalisis kebijakan publik, membaca laporan kinerja dan keuangan daerah, serta mengevaluasi capaian pembangunan. Komponen pembentuk kompetensi tersebut umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Hutapea & Thoha, 2021). Perbedaan tingkat kompetensi antarlegislator berpotensi memengaruhi kualitas kinerja pengawasan pembangunan daerah yang dihasilkan, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian terbaru mengenai kompetensi pegawai sektor publik yang secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara kompetensi dan kinerja (Wijayanti & Sari, 2023; Marlinda & Hasan, 2021).

Di sisi lain, orientasi pelayanan publik dapat dijelaskan melalui perspektif *New Public Service*, yang menegaskan bahwa aktor publik, termasuk legislator, harus menempatkan kepentingan warga negara sebagai fokus utama dalam setiap aktivitas pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2021). Orientasi pelayanan publik tercermin dari komitmen legislator untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mengawal pembangunan agar tepat sasaran, serta memastikan kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi publik (Sabi et al., 2018; Nabavi et al., 2021). Legislator yang memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat cenderung menunjukkan kinerja pengawasan yang lebih substantif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan temuan

bahwa orientasi pelayanan yang tinggi berkaitan erat dengan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap institusi (Kassim & Ali, 2019; Qureshi et al., 2023).

Fenomena tersebut juga tampak pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten Kerinci, yang dalam beberapa tahun terakhir terus melaksanakan agenda pembangunan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur. DPRD Kabupaten Kerinci, yang beranggotakan 30 orang legislator dengan pembagian fraksi dan komisi, terlibat langsung dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan oleh perangkat daerah. Meskipun secara formal berbagai rapat paripurna dan agenda pengawasan telah dilaksanakan, evaluasi pembangunan daerah dalam beberapa periode terakhir masih memperlihatkan persoalan klasik seperti belum optimalnya realisasi program, adanya kegiatan yang belum mencapai target indikator kinerja, hingga ketimpangan pencapaian pembangunan antarsektor. Fakta tersebut menunjukkan masih terdapat ruang evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas kinerja legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan daerah, bukan sekadar ada atau tidaknya kegiatan kedewanan.

Tidak seluruh legislator memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan, administrasi publik, ekonomi, atau bidang teknis lain yang relevan dengan tata kelola pembangunan, karena keberagaman latar belakang anggota dewan—baik dari aktivis politik, pengusaha, tokoh masyarakat, maupun profesi lain—merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Namun demikian, keberagaman tersebut menuntut bahwa setiap legislator tetap memiliki kompetensi dasar dalam memahami dokumen pembangunan, laporan realisasi anggaran, indikator kinerja utama, serta laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Apabila kompetensi tersebut tidak merata dan kemampuan analitis sebagian legislator belum memadai, fungsi pengawasan pembangunan dikhawatirkan hanya berjalan secara administratif tanpa pemahaman substantif. Selain aspek kompetensi, orientasi pelayanan publik legislator turut menentukan kualitas kinerja, mengingat dinamika politik kerap memunculkan situasi di mana sebagian legislator lebih terjebak pada kepentingan kelompok atau fraksi yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan publik.

Kajian terdahulu di bidang administrasi publik dan pemerintahan daerah masih lebih banyak memfokuskan pada kinerja aparatur sipil negara, kinerja organisasi perangkat daerah, atau kualitas pelayanan publik secara umum (Bastian et al., 2024; Piliang et al., 2025; Maryen et al., 2025). Penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja legislator DPRD sebagai subjek utama, terutama yang mengaitkan secara simultan antara kompetensi, orientasi pelayanan publik, dan kinerja legislator dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah, masih relatif terbatas (Ruchend, 2019; Labay et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), baik dari sisi objek, variabel, maupun konteks lokasi penelitian. Pembaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik sebagai faktor penentu kinerja legislator DPRD dengan fokus empiris pada DPRD Kabupaten Kerinci, serta penekanan pada kinerja substantif pengawasan—bukan sekadar kinerja formal-prosedural—seperti kualitas analisis, rekomendasi pengawasan, dan kontribusinya terhadap perbaikan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja legislator, pengaruh orientasi pelayanan publik terhadap kinerja legislator, serta pengaruh kompetensi dan orientasi pelayanan publik secara simultan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi publik dan studi legislatif daerah, serta kontribusi praktis bagi DPRD Kabupaten Kerinci dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas legislator dan penguatan fungsi pengawasan pembangunan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena melalui data numerik yang kemudian dianalisis secara statistik (Suharsaputra, 2018), sedangkan pendekatan asosiatif bertujuan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Penelitian ini secara khusus menguji hubungan kausal antara variabel kompetensi (X1) dan orientasi pelayanan publik (X2) terhadap kinerja legislator (Y) pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan waktu pelaksanaan dari November 2025 hingga Februari 2026.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berjumlah 30 orang. Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 orang, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (*total sampling*), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan

demikian, seluruh 30 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci menjadi responden penelitian melalui penyebaran kuesioner secara langsung.

Data dikumpulkan melalui metode kuesioner berisi daftar pernyataan terstruktur yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2019). Pengukuran terhadap variabel dependen dan independen menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang skor 1 untuk jawaban “sangat tidak setuju” hingga skor 5 untuk jawaban “sangat setuju”. Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, semakin positif sikap responden terhadap objek yang diukur.

Variabel kinerja legislator (Y) didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan ketepatan waktu (Hasibuan, 2019), yang diukur melalui lima indikator meliputi produktivitas legislator, responsivitas terhadap aspirasi publik, akuntabilitas kinerja, efektivitas pengawasan pembangunan, dan kualitas hasil kebijakan (Halimatussakdiah, 2025). Variabel kompetensi (X1) didefinisikan sebagai kemampuan individu yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif (Rahma, 2021), yang diukur melalui tiga indikator yaitu pengetahuan (knowledge), kemampuan/keterampilan (skill), dan sikap (attitude) (Hutapea & Thoha, 2021). Variabel orientasi pelayanan publik (X2) dipahami sebagai orientasi nilai dan perilaku dalam birokrasi yang menitikberatkan pemenuhan kebutuhan, kepuasan, dan keberlanjutan layanan terhadap masyarakat (Sabi et al., 2018), yang diukur melalui lima dimensi SERVQUAL meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles) (Parasuraman et al., 2018).

Instrumen penelitian diuji melalui dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (*corrected item-total correlation*) terhadap r tabel; item dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5 persen (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, dengan kriteria suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal (signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan distribusi normal); uji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), di mana tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10; serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, di mana model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018).

Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data primer ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menghitung skor total, rata-rata skor, dan Tingkat Capaian Responden (TCR) untuk setiap item dan variabel (Arikunto, 2016). Skor total dihitung dari akumulasi perkalian frekuensi jawaban dengan bobot skala Likert, rata-rata skor diperoleh dari skor total dibagi jumlah responden, dan TCR dihitung dari rata-rata skor dibagi skor maksimal (5) dikali 100 persen. Nilai TCR diinterpretasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat baik (90–100%), baik (80–89,9%), cukup baik (65–79,9%), tidak baik (55–64,9%), dan sangat tidak baik (0–54,9%) (Arikunto, 2016).

Analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25, mengikuti persamaan $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, di mana Y adalah kinerja legislator, α adalah konstanta, X_1 adalah kompetensi, X_2 adalah orientasi pelayanan publik, b_1 dan b_2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel, dan e adalah error (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain konstan (Sugiyono, 2019), serta uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2019). Kriteria pengujian uji t dan uji F didasarkan pada perbandingan nilai t hitung/ F hitung dengan t tabel/ F tabel, serta perbandingan nilai signifikansi dengan taraf alpha 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi (R^2) dihitung untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik dalam menjelaskan variasi kinerja legislator (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden penelitian menunjukkan bahwa dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang (80%) dan perempuan sebanyak 6 orang (20%). Berdasarkan kelompok usia, responden berusia di bawah 30 tahun sebanyak 2 orang (6%), usia 31–40 tahun sebanyak 8 orang (27%), usia 41–50 tahun sebanyak 12 orang (40%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 8 orang (27%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas legislator berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman politik, yang berpotensi mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih berpengalaman.

Tabel 1 <Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia>

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	24	80,0
	Perempuan	6	20,0
Usia	< 30 tahun	2	6,0
	31–40 tahun	8	27,0
	41–50 tahun	12	40,0
	> 50 tahun	8	27,0

Data Arsip DPRD Kabupaten Kerinci, 2026

Tabel 2 <Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	Rentang r Hitung	r Tabel	Ket.
Kinerja Legislator (Y)	10	0,613 – 0,856	0,3610	Valid
Kompetensi (X1)	6	0,763 – 0,874	0,3610	Valid
Orientasi Pelayanan Publik (X2)	10	0,756 – 0,884	0,3610	Valid

Data diolah, 2026

Pengujian validitas instrumen menggunakan kriteria r tabel sebesar 0,3610 ($N = 30$, $\alpha = 5\%$). Seluruh item pernyataan pada ketiga variabel—kinerja legislator, kompetensi, dan orientasi pelayanan publik—menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, dengan rentang nilai berkisar antara 0,613 hingga 0,946, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 3 <Hasil Uji Reliabilitas>

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kinerja Legislator (Y)	0,944	0,60	Reliabel
Kompetensi (X1)	0,941	0,60	Reliabel
Orientasi Pelayanan Publik (X2)	0,963	0,60	Reliabel

Data diolah, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,944 untuk variabel kinerja legislator, 0,941 untuk variabel kompetensi, dan 0,963 untuk variabel orientasi pelayanan publik. Ketiga nilai tersebut jauh melampaui ambang batas 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan sangat reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Uji normalitas dengan statistik Kolmogorov–Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual data dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,995 dan VIF sebesar 1,005 untuk kedua variabel bebas, jauh di bawah ambang batas VIF 10 dan di atas ambang batas tolerance 0,10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas antara variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,276 untuk variabel kompetensi dan 0,091 untuk variabel orientasi pelayanan publik, keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut, model regresi linier berganda dalam penelitian ini layak digunakan untuk menguji hipotesis.

Tabel 4 <Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik>

Jenis Uji	Variabel	Nilai Statistik	Kriteria	Keterangan
Normalitas (K-S)	Unstandardized Residual	Sig. = 0,200	Sig. > 0,05	Normal
Multikolinearitas	Kompetensi (X1)	Tol. = 0,995; VIF = 1,005	Tol. > 0,10; VIF < 10	Tidak ada multikolinearitas
	Orientasi Pelayanan Publik (X2)	Tol. = 0,995; VIF = 1,005	Tol. > 0,10; VIF < 10	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser)	Kompetensi (X1)	Sig. = 0,276	Sig. > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
	Orientasi Pelayanan Publik (X2)	Sig. = 0,091	Sig. > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas

Data diolah, 2026

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja legislator memperoleh rata-rata Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 73,27%, variabel kompetensi sebesar 73,22%, dan variabel orientasi

pelayanan publik sebesar 72,53%, yang seluruhnya berada pada kategori cukup baik. Nilai TCR terendah pada variabel kinerja legislator terdapat pada indikator efektivitas pengawasan pembangunan, khususnya terkait keterlibatan langsung anggota dewan dalam proses pengawasan di lapangan. Pada variabel kompetensi, nilai TCR terendah berada pada indikator sikap (attitude), terutama menyangkut pelaksanaan tugas secara profesional dan etis. Sementara itu, pada variabel orientasi pelayanan publik, nilai TCR terendah ditemukan pada tiga indikator, yaitu keandalan, daya tanggap, dan bukti fisik pelayanan. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun secara keseluruhan kinerja dan kapasitas legislator berada pada kategori yang memadai, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek keterlibatan substantif dan profesionalisme sikap dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 5 <Ringkasan Tingkat Capaian Responden (TCR) >

Variabel	Rata-Rata Skor	TCR (%)	Kriteria
Kinerja Legislator (Y)	3,66	73,27	Cukup Baik
Kompetensi (X1)	3,66	73,22	Cukup Baik
Orientasi Pelayanan Publik (X2)	3,63	72,53	Cukup Baik

Data diolah, 2026

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan $Y = 4,648 + 0,347X1 + 0,672X2$, yang menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 4,648 berarti apabila variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik bernilai nol, maka kinerja legislator berada pada nilai 4,648. Koefisien regresi kompetensi sebesar 0,347 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kompetensi akan meningkatkan kinerja legislator sebesar 0,347 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi orientasi pelayanan publik sebesar 0,672 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan orientasi pelayanan publik akan meningkatkan kinerja legislator sebesar 0,672 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Besaran koefisien ini mengindikasikan bahwa orientasi pelayanan publik memberikan kontribusi marginal yang lebih besar dibandingkan kompetensi dalam memprediksi kinerja legislator pada konteks penelitian ini.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator, dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,122 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,05183, serta nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki legislator—baik dalam aspek pengetahuan terhadap regulasi dan dokumen pembangunan, keterampilan analisis kebijakan, maupun sikap profesionalisme dan integritas—maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Temuan ini konsisten dengan berbagai kajian terkini yang menegaskan bahwa kompetensi merupakan determinan kuat terhadap kinerja pegawai maupun pejabat publik, baik melalui jalur langsung maupun melalui penguatan budaya organisasi (Wijayanti & Sari, 2023; Piliang et al., 2025; Marlinda & Hasan, 2021). Kompetensi memberikan dasar kemampuan teknis yang memungkinkan legislator memahami secara mendalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sehingga rekomendasi pengawasan yang dihasilkan lebih substantif dan berbasis data, bukan sekadar bersifat administratif-seremonial.

Tabel 6 <Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t>

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t Hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	4,648	3,657	1,271	0,215	-
Kompetensi (X1)	0,347	0,111	3,122	0,004	Signifikan
Orientasi Pelayanan Publik (X2)	0,672	0,070	9,649	0,000	Signifikan

Data diolah, 2026. t tabel ($df=27; \alpha=0,05$) = 2,05183

Hasil uji t juga menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator, dengan nilai t hitung sebesar 9,649 yang jauh melampaui t tabel sebesar 2,05183, serta nilai signifikansi 0,000. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa orientasi pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima. Nilai t hitung yang jauh lebih besar dibandingkan variabel kompetensi mengindikasikan bahwa orientasi pelayanan publik merupakan prediktor yang relatif lebih dominan dalam menjelaskan kinerja legislator pada konteks penelitian ini. Hal ini sejalan dengan perspektif New Public Service yang menempatkan kepentingan warga sebagai fokus utama setiap tindakan aktor publik (Denhardt & Denhardt, 2021), serta temuan empiris terbaru yang menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik berkontribusi signifikan terhadap kinerja melalui penguatan komitmen, motivasi intrinsik, dan akuntabilitas pelayanan (Hartono & Suryani, 2024; Adiningsih & Wibowo, 2025; Qureshi et al., 2023). Dalam konteks DPRD Kabupaten Kerinci, orientasi pelayanan publik tercermin

dari upaya anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, menindaklanjuti keluhan publik, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja pengawasan secara keseluruhan.

Tabel 7 <Hasil Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi>

Statistik	Nilai
F Hitung	49,613
F Tabel	3,35
Sig.	0,000
R	0,887
R Square	0,786
Adjusted R Square	0,770
Std. Error of the Estimate	2,42937

Data diolah, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 49,613 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,35, dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kompetensi dan orientasi pelayanan publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima. Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel memiliki peran yang saling melengkapi: kompetensi memberikan dasar kemampuan teknis dan profesional yang diperlukan dalam menjalankan tugas, sementara orientasi pelayanan publik memberikan arah dan tujuan pelaksanaan tugas agar tetap berfokus pada kepentingan masyarakat. Legislator yang memiliki kompetensi tinggi namun tidak diimbangi orientasi pelayanan publik yang kuat berisiko kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebaliknya orientasi pelayanan publik yang tinggi tanpa didukung kompetensi memadai dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas. Pola hubungan saling melengkapi ini juga ditemukan pada studi-studi terbaru mengenai kinerja sektor publik yang menekankan pentingnya integrasi kapasitas teknis dan orientasi nilai pelayanan secara bersamaan (Fan et al., 2022; Mishra & Hassen, 2023; Zubair et al., 2021).

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,786 menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik secara bersama-sama menjelaskan 78,6% variasi kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sedangkan sisanya sebesar 21,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, atau dinamika politik internal fraksi. Besaran kontribusi ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa model penelitian yang dibangun memiliki daya jelas (*explanatory power*) yang kuat terhadap variasi kinerja legislator di lokasi penelitian.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja legislator tidak dapat dipandang sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Kerinci perlu dilakukan secara komprehensif, baik melalui penguatan kompetensi teknis—misalnya melalui bimbingan teknis pembacaan dokumen anggaran dan analisis kebijakan publik—maupun melalui penguatan orientasi pelayanan publik, seperti pelatihan etika jabatan publik dan penguatan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Sejalan dengan rendahnya capaian pada indikator keterlibatan langsung dalam pengawasan lapangan, profesionalisme sikap, dan keandalan-daya tanggap pelayanan, penguatan pada aspek-aspek tersebut diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi fungsi pengawasan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas pengetahuan, keterampilan analisis kebijakan, dan sikap profesional legislator merupakan prasyarat penting bagi efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedua, orientasi pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator, dengan kontribusi marginal yang lebih besar dibandingkan kompetensi, menunjukkan bahwa komitmen terhadap kepentingan masyarakat menjadi pendorong utama efektivitas kinerja kedewanan pada konteks penelitian ini. Ketiga, kompetensi dan orientasi pelayanan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja legislator dengan kontribusi sebesar 78,6%, yang mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dikembangkan secara bersamaan, bukan secara terpisah, untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan pembangunan daerah.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya DPRD Kabupaten Kerinci dan pemangku kebijakan terkait merancang program peningkatan kapasitas legislator yang mengintegrasikan dimensi teknis dan dimensi nilai pelayanan secara seimbang, antara lain melalui bimbingan teknis analisis dokumen pembangunan, penguatan

kode etik dan profesionalisme jabatan publik, serta penguatan mekanisme penyerapan dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan memperluas model dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan, atau budaya organisasi, serta memperluas unit analisis pada beberapa DPRD di wilayah berbeda agar diperoleh temuan yang lebih generalizable.

Referensi

- Adiningsih, R., & Wibowo, A. (2025). Organizational culture and public-centered service orientation in local government institutions. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 45–58.
- Alyahya, K. O. (2020). Leadership styles and organizational performance: A public sector perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 6(1), 1–26.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, R. Y., Rangkuti, Z., & Pratikno, Y. (2024). Pengaruh kompetensi, integritas dan koordinasi terhadap efektivitas kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 1168–1181.
- Campion, M. A., Fink, A. A., Ruggeberg, B. J., Carr, L., Phillips, G. M., & Odman, R. B. (2020). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. *Personnel Psychology*, 73(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/peps.12366>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2021). *The new public service: Serving rather than steering* (4th ed.). Routledge.
- Dessler, G. (2024). *Human resource management* (17th ed.). Pearson Education.
- Fadholi, T. F. H., & Musslifah, A. R. (2024). Pengaruh pengendalian emosi terhadap orientasi pelayanan publik Anggota Polres Sukoharjo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 55–66.
- Fan, P., Hsieh, C.-W., & Ma, L. (2022). Public service management and individual performance: A review and research agenda. *Public Performance & Management Review*, 45(4), 821–845. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2057990>
- Fikri, M., Haekal, R., & Effendy, A. A. (2024). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal DPR RI. *Cakrawala: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 406–414.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimatussakhidiah. (2025). Indikator kinerja legislator dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 22–37.
- Hartono, B., & Suryani, D. (2024). Strategic public service orientation and accountability in local government reform. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 88–101.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia* (Rev. ed.). Bumi Aksara.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2021). *Kompetensi plus: Teori, desain, kasus dan penerapan untuk HR serta organisasi yang dinamis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kassim, N. M., & Ali, M. A. (2019). Public service orientation and citizens' satisfaction in public sector service delivery. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 421–435. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1466898>
- Labay, I., Sujianto, & Zulkarnaini. (2021). Kompetensi pengetahuan, keterampilan, motivasi kerja, dan kinerja Anggota DPRD. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 136–141.
- Leston-Bandeira, C., & Thompson, L. (2020). *Exploring parliamentary performance: Theories, evidence and practice*. Oxford University Press.
- Lijphart, A. (2021). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (3rd ed.). Yale University Press.
- Lusinto, W. H. (2023). Pengaruh penerapan orientasi pelayanan publik dan motivasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai bidang kesehatan lingkungan. *Faletihan Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1–15.
- Maabuat, E. S. (2019). Pengaruh kepemimpinan, orientasi pelayanan publik, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai (Studi pada Dispenda Sulut UPTD Tondano). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 219–231.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Marlinda, & Hasan, H. (2021). The effect of work discipline, competency, and integrity on employee performance in regional secretariat environment in Pariaman City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 127–139.
- Maryen, A., Clan, E., & Watory, I. (2025). Pengaruh kompetensi dan kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Distrik Sorong Utara. *Journal of Social Science Research*, 5(1), 7158–7170.

- Mishra, S. S., & Hassen, M. H. (2023). Servant leadership and employee's job performance: The role of public service motivation in Ethiopian public sector organizations. *International Journal of Public Leadership*, 19(1), 64–80. <https://doi.org/10.1108/IJPL-05-2022-0025>
- Nabavi, R., Taghizadeh, M., & Zarei, A. (2021). Public service orientation and service quality in government organizations. *Journal of Public Affairs*, 21(4), e2243. <https://doi.org/10.1002/pa.2243>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (2018). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Piliang, E., Koto, M. S., & Irsyan, A. (2025). Pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sibolga. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 61–74.
- Putri, A. R., & Lestari, S. (2023). Komitmen moral dan profesionalisme dalam pelayanan publik berkeadilan sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 134–149.
- Qureshi, M. I., Hassan, M. A., Hishan, S. S., Rasli, A. M., & Zaman, K. (2023). Service orientation in public sector institutions and its impact on public satisfaction. *International Journal of Public Sector Management*, 36(2), 215–233. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2022-0098>
- Rahma. (2021). *Manajemen kinerja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, K. M., Fachruddin, I., Pramono, T., Abror, D., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 5(1), 50–57. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1501>
- Rizvi, S., & Crozier, M. (2021). Citizens' engagement and public service responsiveness: Rethinking service orientation in public administration. *Public Management Review*, 23(9), 1331–1349. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718189>
- Ruchend, H. (2019). Pengaruh kompetensi kinerja terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang. *JIA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 233–248.
- Sabi, M., Wijaya, A., & Putranto, T. (2018). Public service orientation in bureaucratic value and behavior: Toward sustainable service delivery. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 4(3), 245–261.
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.
- Siagian, I. M. G. (2019). Pengaruh komitmen kerja dan orientasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai ASN di Kantor Camat Medan Marelan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 90–101.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan* (Rev. ed.). Refika Aditama.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. UNDP.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2020). *Performance management in the public sector* (3rd ed.). Routledge.
- Vandenabeele, W., Ritz, A., & Neumann, O. (2018). Public service motivation: State of the art and conceptual cleanup. *Public Administration Review*, 78(4), 593–606. <https://doi.org/10.1111/puar.12930>
- Wijaya, H., & Prasetyo, T. (2022). Reforming public sector service orientation toward transparency and accountability. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.
- Wijayanti, F., & Sari, R. T. (2023). The influence of competency on employee performance: A literature review. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(6), 920–931. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i6.118>
- Wright, B. E., Christensen, R. K., & Pandey, S. K. (2017). Measuring public service motivation: Exploring conceptual and empirical overlap. *International Public Management Journal*, 20(2), 1–28. <https://doi.org/10.1080/10967494.2016.1276033>
- Zubair, S. S., Khan, M. A., & Mukaram, A. T. (2021). Public service motivation and organizational performance: Catalyzing effects of altruism, perceived social impact and political support. *PLOS ONE*, 16(12), e0260559. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260559>